



## Implementasi Program BSPS Sebagai Penanganan Kemiskinan Ekstrem Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kemuning

Putri Puspitasari<sup>1</sup>, Syamsul Huda<sup>2</sup>, Anisa Fitria Utami<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

### Abstrak

Received : 18 September 2023  
Revised : 27 September 2023  
Accepted : 02 Oktober 2023

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana program BSPS dalam menangani kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dari segi kualitas rumah menjadi layak huni. Penulis dalam metode penelitian menggunakan triangulasi model yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi dari artikel, buku, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dalam analisisnya. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang selalu ditemukan di Indonesia. Kemiskinan menjadi fokus utama pemerintah dalam berbagai kebijakan baik pemerintah pusat ataupun daerah. Salah satu program dalam upaya menangani kemiskinan yaitu BSPS melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi MBR. Program BSPS memberikan 2 dampak baik jangka panjang ataupun jangka pendek yaitu adanya penyerapan tenaga kerja dan peningkatan nilai jual rumah serta kualitas rumah menjadi layak

**Kata Kunci:** Kemiskinan, BSPS, Kesejahteraan

(\*) Corresponding Author: [46putriuspitasari@gmail.com](mailto:46putriuspitasari@gmail.com)

**How to Cite:** Puspitasari P, Huda S, & Utami A F. (2023). Implementasi Program BSPS Sebagai Penanganan Kemiskinan Ekstrem Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kemuning. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8435231>

## PENDAHULUAN

Manusia memiliki kebutuhan dasar agar terselenggara kegiatan tumbuh dan berkembang yang harus dipenuhi. Kebutuhan ini mencakup beberapa aspek yang meliputi kebutuhan akan pangan, pakaian, dan terutama tempat tinggal layak huni sebagai kebutuhan dasar. Dalam praktiknya, upaya yang dilakukan pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan tersebut jauh dari kata sempurna sesuai harapan masyarakat. Penyebabnya adalah adanya faktor berdampingan dengan masyarakat yang salah satunya yakni ekonomi. Pada hakikat, ekonomi memandang manusia memiliki berbagai macam kebutuhan dan keinginan yang harus terpenuhi dengan jumlah tak terhingga. Untuk itu diperlukan alat pembeda antara maksud dari kebutuhan dan keinginan tersebut. Berdasarkan cara pandang Islam, ekonomi dimaknai sebagai aktivitas agar terselenggara peningkatan perekonomian berlandaskan Al-Quran, Sunnah, dan Al-Maqasid dalam upaya mencegah adanya kemiskinan (Firmansyah et al., 2022).

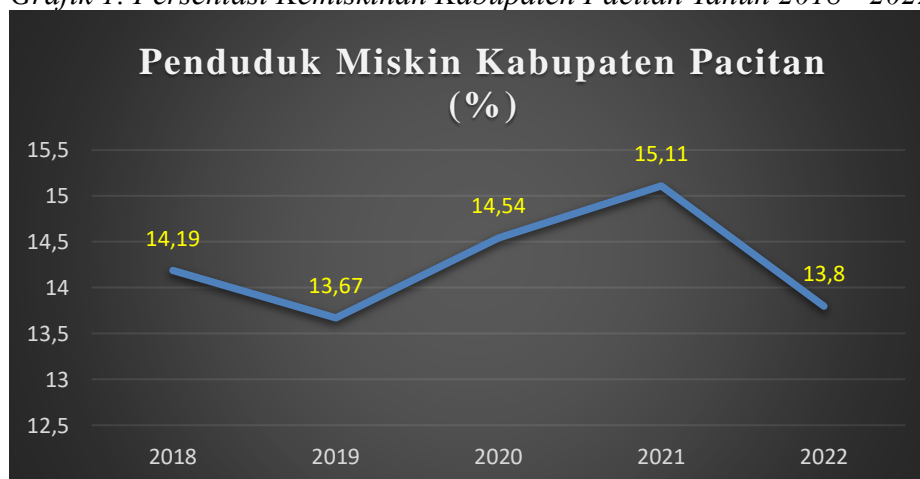
BPS memaknai kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam mencukupi kebutuhan dasar atas pangan dan non-pangan berdasarkan sisi pengeluaran ekonomi. Konsep ini menggunakan dasar pemikiran “*Hanbook on Poverty and Inequality*” sehingga masyarakat yang memiliki nilai pengeluaran per bulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (Badan Pusat Statistik, 2022). Kemiskinan diartikan bahwa seorang manusia dalam situasi

tertentu mengalami keadaan sulit melaksanakan aktivitas hidupnya walaupun hanya kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Oleh sebab itu, beberapa efek yang timbul akibat kemiskinan hampir mencakup seluruh aspek seperti pemenuhan kebutuhan akan rumah berstandar layak huni (Dharma & Bangun, n.d.).

Nurkse menjabarkan bahwa ketertinggalan dan keterbatasan atas modal berakibat pada rendahnya produktivitas masyarakat. Hal ini mengakibatkan besaran pendapatan yang diterima oleh masyarakat menjadi rendah seperti dijelaskan dalam “Teori Lingkaran Setan” (Nasution, 2019). Teori tersebut memberikan gambaran bahwa kurangnya rangsangan dalam investasi dan keterbelakangan sosial budaya masyarakat membentuk faktor yang menghambat perkembangan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan data, tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2021 mencapai 9.71 persen dan jika dihitung dalam jumlah individu sebanyak 26,50 juta orang dari total penduduk sebanyak 273,8 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2022). Adanya fenomena tersebut, pemerintah berupaya keras melalui konsep percepatan penanganan kemiskinan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksinkronan antara realitas dengan konsep yang disusun untuk menangani kemiskinan (Sari et al., 2022). Sehingga dampak yang ditimbulkan hanya dalam persentase kecil terhadap penurunan angka kemiskinan. Permasalahan kemiskinan ini dipandang kompleks dan memerlukan sebuah intervensi dari berbagai pihak secara terkoordinasi serta beriringan. Sebab, setiap tahunnya diketahui bahwa penduduk miskin mengalami kenaikan kuantitas baik di wilayah kota maupun desa. Dan fenomena tersebut tidak terkecuali terjadi di Kabupaten Pacitan.

Kabupaten Pacitan adalah salah satu diantara banyaknya kabupaten di Jawa Timur dengan keadaan geografis berupa pegunungan kapur dan hamparan pantai. Luas wilayah kabupaten ini sebesar 1.389,87 km<sup>2</sup> yang dibagi menjadi 12 kecamatan dengan jumlah populasi mencapai 589.109 jiwa berdasarkan SP 2020. Berikut adalah persentasi penduduk miskin di Kabupaten Pacitan:

*Grafik 1. Persentasi Kemiskinan Kabupaten Pacitan Tahun 2018 - 2022*



Sumber: Data diolah penulis (2023)

Dari data tersebut diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Pacitan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lapangan pekerjaan yang rendah, keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat terbatas, dan keadaan geografis wilayah. Akibatnya terjadi kesenjangan antar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan masyarakat menengah atas

pada kemampuan daya beli. Kesenjangan atau ketimpangan yang terjadi bukan hanya dalam lingkup kegiatan ekonomi masyarakat melainkan juga lingkup sosial budaya. Ketimpangan sendiri diartikan sebagai keadaan yang disebabkan oleh kondisi demografi dan sumber daya berbeda yang mengakibatkan adanya *developed region* dan *under developed region* (Andiny & Mandasari, 2017). Sedangkan Permen PUPR No. 07 Tahun 2022 memaknai “MBR sebagai masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah” (M. P. U. dan P. Rakyat, 2022).

Pemerintah dalam merespon persoalan tersebut melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengimplementasikan alternatif solusi revitalisasi menggunakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan alokasi dana sebesar Rp 20.000.000 per rumah. Program ini memiliki orientasi membangun berkelanjutan sebagai upaya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) setiap tahunnya dengan subyek MBR. Rumah layak huni diartikan juga sebagai bangunan yang berada di lokasi permukiman sebagai tempat untuk melakukan aktifitas yang mendukung perikehidupan dan dilengkapi adanya prasarana, utilitas, dan sarana lainnya sebagai penunjang (K. P. U. dan P. Rakyat, 2017). Adapun beberapa persyaratan rumah dikatakan layak untuk ditempati berdasarkan “Peraturan Menteri Negara PUPR Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota” bahwa Pertama, rumah yang dibangun harus memenuhi syarat keselamatan bangunan yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis yaitu memiliki struktur bangunan seperti besi, beton, dan lain sebagainya. Kedua, harus sesuai dengan kecukupan luas minimum bangunan sebesar 7.2 m<sup>2</sup> per orang. Ketiga, Persyaratan kesehatan dan kenyamanan yang meliputi sanitasi, MCK, air bersih, dan pencahayaan yang cukup.

Di Indonesia terutama Kabupaten Pacitan tengah mengalami masalah kemiskinan dan pengangguran yang mengakibatkan pendapatan masyarakat termasuk dalam kategori berpenghasilan rendah. Hal ini memberi pengaruh bagaimana kondisi tempat tinggal masyarakat yaitu tumbuh dan berkembang di rumah tidak layak huni. Rumah diartikan sebagai hunian berlindung dari berbagai ancaman keadaan sekitar dan tempat beristirahat setelah beraktivitas sehari-hari. Sehingga diperlukan ruang gerak yang cukup luas bagi penghuninya agar dapat beraktivitas dengan aman, nyaman dan terhindar dari faktor yang berdampak buruk bagi kesehatan (Zain & Wardani, 2019). Berikut adalah data terkait sebaran wilayah dan jumlah RTLH Kabupaten Pacitan (K. P. U. dan P. Rakyat, 2023) :

<b>Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pacitan</b>	
Bukan Milik Sendiri	147
Milik Sendiri	10,261

Tanah Negara	3	<i>Tabel 1. Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pacitan - Data</i>
<b>Total Keseluruhan</b>	<b>10,411</b>	

*Real Time (13 Juni 2023, 22.45 WIB).*

Sumber: [www.datartlh.perumahan.pu.go.id](http://www.datartlh.perumahan.pu.go.id) (Diolah Penulis 2023)

Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah RTLH di Kabupaten Pacitan memiliki nilai yang cukup besar yaitu 10,411 unit Rumah. Ketika ditarik kesimpulan bilamana 1 rumah ditempati 1 KK maka terdapat 10,411 KK yang menghuni rumah tidak layak. Walaupun demikian ternyata secara spesifik masalah perumahan tidak tercantum dalam 17 tujuan dari program SDGs yang digagas oleh *World Bank*. Namun RTLH masuk dalam indikasi bahwa rumah memiliki keterkaitan erat dengan masalah lain seperti kelaparan, rendahnya pendidikan, kesulitan air bersih, kesehatan & pendidikan yang rendah, serta sanitasi lingkungan yang kotor. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya akan kebutuhan rumah yang layak dan sejahtera dalam menurunkan kemiskinan yang mana merupakan indikator ekonomi. Kesejahteraan masyarakat dimaknai dengan terwujudnya bangunan yang layak untuk bertenduh, beraktivitas, dan dihuni sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memfasilitasi kebutuhna tersebut melalui berbagai program pembangunan yang salah satunya ditujukan kepada MBR yaitu program BSPS (Handayani & Safrida, 2022).

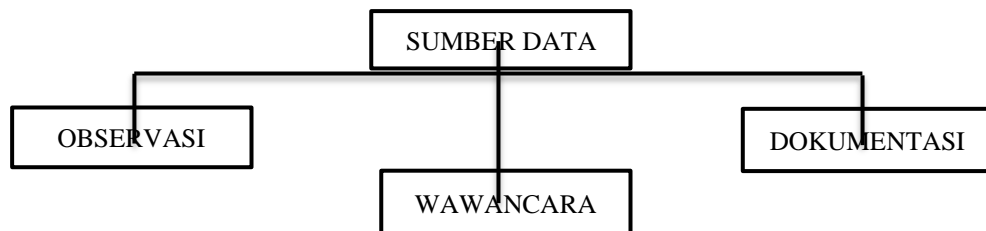
Penulis menggunakan fokus penelitian di Desa Kemuning yang merupakan salah satu wilayah penerima program BSPS Penanganan Kemiskinan Ekstrim. Yang mana desa tersebut daerah dataran tinggi bertebing yang dikelilingi hamparan sawah terasering. Hal ini berakibat pada kondisi sosial ekonomi masyarakat yang kurang berkembang sehingga pendapatan mereka tidak mencapai setengah dari UMP Jawa Timur yaitu Rp 2.040.244,30 dan UMK Kabupaten Pacitan yaitu Rp 2.157.270,25 di tahun 2023. Dari beberapa problematika yang diuraikan di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program BSPS sebagai Penanganan Kemiskinan Ekstrim untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kemuning” untuk mengetahui capaian program tersebut atas kesejahteraan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis mengenakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mana teknik pengambilan data melalui triangulasi model. Triangulasi hakekatnya merupakan sebuah multimetode dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi (Fathurohman et al., 2021). Sedangkan deskriptif kualitatif ialah metode secara alamiah yang dilakukan secara alamiah dan peran penulis sebagai kunci dari penjabaran hasil penelitian dalam bentuk narasi maupun gambar.

Metode penelitian yang digunakan diatas salah satunya yaitu studi dokumentasi atau sering disebut dengan aplikasi *library research*. Pendekatan tersebut dilakukan melalui membaca, melakukan telaah, dan menulis suatu hal yang berkaitan dengan objek permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam mengambil data yaitu **Pertama**, melalui data sekunder seperti data yang berasal bukan dari sumber utama melainkan dri artikel, jurnal, dokumen penting, buku, dan statistik dari instansi pemerintah. **Kedua**, melalui wawancara terhadap informan yang memiliki keterkaitan dengan fenomena yang dilakukan penelitian. Wawancara yang dilakukan tidak terstruktur sehingga tidak terpaku pada pedoman wawancara yang ditunjukkan kepada elemen terkait. Adapun sumber data melalui wawancara bersumber dari 2 orang penerima bantuan BPS Desa Kemuning dan 1 tenaga Fasilitator BPS Kabupaten Pacitan bertanggung jawab atas Desa Kemuning.

*Bagan 1. Model Analisis Data Triangulasi*



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Geografis Desa Kemuning

Kemuning merupakan salah satu desa di Kecamatan Tegalombo yang letak wilayahnya berada di daerah pegunungan kapur dan berbatasan langsung dengan kecamatan Bandar. Wilayah Desa Kemuning luasnya mencapai 1601 hektar yang memiliki iklim kemarau dan penghujan. Sedangkan untuk populasi yang tinggal di desa ini mencapai 5.640 jiwa dengan uraian 2.874 pria dan 2.766 wanita. Berdasarkan data kependudukan Desa Kemuning diketahui bahwa wilayahnya terbagi menjadi 6 Dusun yaitu Grigak, kemuning, Krajan, Pulerejo, Sempu, dan Tosari. Untuk mata pencaharian utama masyarakat Desa Kemuning sendiri didominasi oleh sektor pertanian dan peternakan yang meliputi ternak sapi dan kambing. Hal ini dikarenakan wilayah Desa Kemuning melintang persawahan terasering dibawah tebing-tebing kapur.

### Implementasi Program BPS di Desa Kemuning

Kemiskinan merupakan akar dari segala masalah kehidupan dan dapat diidentifikasi menjadi beberapa jenis seperti kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan alami. **Pertama**, Kemiskinan absolut ialah masalah kemiskinan yang faktor penyebabnya akibat pendapatan individu atau keluarga tidak menacapai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sulit dilakukan. **Kedua**, Kemiskinan relatif ialah masalah kemiskinan yang faktor penyebabnya terkait kebijakan pembangunan yang tidak merata di semua sektor masyarakat. Hal ini berakibat pada kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan angkatan kerja yang menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. **Ketiga**, Kemiskinan alami ialah masalah kemiskinan yang faktor penyebabnya akibat SDA dan SDM disekitarnya terbatas serta tidak mampu mengelola kekayaan tersebut dengan baik.

Kabupaten Pacitan ialah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan menjadi 13,8 persen ditahun 2022. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 dalam aspek perumahan rakyat dan permukiman tahun 2020, diketahui bahwa terdapat trend peningkatan jumlah rumah layak huni sebesar 99,72 persen dan penurunan RTLH sebesar 416 rumah. Uraian atas capaian tersebut merupakan hasil dari upaya pemerintah melalui berbagai program pemerintah pusat ataupun daerah dalam penanganan kemiskinan ekstrem untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu dalam penanganan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Pacitan berhasil dalam menurunkan persentase permukiman kumuh menjadi 0 persen. Hal ini lah yang mendasari pembangunan dalam hal peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni sebagai upaya dukungan atas penurunan persentase permukiman kumuh.

Pemerintah menyelenggarakan alternatif terobosan dalam aspek penanganan kemiskinan ekstrem melalui Program BPS. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ialah sebuah program yang digagas oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR bagi MBR dalam upaya mendorong serta meningkatkan kualitas rumah menjadi layak huni melalui keswadayaan beserta perbaikan fasilitas PSU (Desyra, 2022). Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dimaknai sebagai masyarakat dengan pendapatan per bulan kurang dari setengah UMP Jawa Timur yaitu Rp 2.040.244,30 dan UMK Kabupaten Pacitan yaitu Rp 2.157.270,25 di tahun 2023. Dalam program BPS terdapat dua jenis sasaran pembangunan yakni program PKRS dan PBR. PKRS ialah pelaksanaan renovasi rumah tidak layak huni untuk melakukan peningkatan kualitas bangunan rumah. Sedangkan PBR ialah pelaksanaan pembangunan baru akibat kerusakan berat atas bangunan rumah. Hal ini dikarenakan tidak ada cara lain karena kondisi rumah begitu mengalami kerusakan parah sehingga perlu dilakukan pembangunan baru.

Implementasi program BPS di Desa kemuning menggunakan pedoman “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus”. Implementasi mempunyai arti sebagai sebuah proses yang mengimplikasikan berbagai sumber seperti manusia, modal, pengorganisasian oleh pemerintah atau swasta dalam mencapai maksud yang menjadi sasaran kebijakan (Ryan et al., 2020). Implementasi dijabarkan menjadi sebuah proses yang sistematis dengan aktivitas berdasarkan pengorganisasian terkait interpretasi dan penerapan agar tercapai secara optimal (Rofiqoh & Asmuni, 2021).

Dan untuk wujud penyerahan bantuan dalam Program BPS Penanganan Kemiskinan Ekstrem yaitu berupa uang dan material bangunan yang bebannya menggunakan alokasi dana APBN. Adapun rincian bantuan Program BPS di Desa Kemuning berdasarkan wawancara dengan Tenaga Fasilitator Lapangan yaitu :

Tabel 2. Rincian Dana Bantuan BSPS Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023

	<b>TAHAP 1 Pembangunan 0 – 30%</b>	<b>TAHAP 2 Pembangunan 30 – 100%</b>	<b>Total Bantuan</b>
<b>Material Bangunan</b>	Rp 8.750.000,-	Rp 8.750.000,-	Rp 20.000.000,-
<b>Upah Tukang</b>	Rp 1.250.000,-	Rp 1.250.000,-	

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel di atas, bantuan stimulant dalam Program BSPS digunakan hanya sebagai pancingan bagi masyarakat agar sadar akan pentingnya membangun rumah yang layak huni. Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan dana tambahan untuk mewujudkan rumah melalui keswadayaan masyarakat. Nilai swadaya yang dimiliki masyarakat berdasarkan wawancara dengan salah satu penerima bantuan BSPS Desa Kemuning yaitu Nuryanto selaku Ketua PB bahwa rata-rata nilai swadaya masyarakat dalam membangun rumah layak huni sebesar ± Rp 25.000.000,- sampai dengan Rp 35.000.000,-. Selain dalam bentuk uang, masyarakat juga melakukan swadaya dalam bentuk barang yang meliputi material lama yang masih kokok, misalnya genteng, kusen pintu, kusen jendela, dan lain sebagainya.

Penerima bantuan di Desa kemuning dalam Program BSPS PKE berjumlah 17 PB yang berlokasi di Dusun Grigak. Dalam pelaksanaan program ini ada beberapa instansi yang terlibat yaitu Dinas Perkimtan Kabupaten Pacitan dan jajaran perangkat Desa Kemuning sebagai dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan program bantuan. Untuk rata-rata usia penerima bantuan didominasi umur lansia dan umumnya tidak memiliki alat komunikasi elektronik seperti *Handphone*. Hal tersebut mengakibatkan komunikasi antar PB dan pendamping kurang lancar sehingga dibutuhkan upaya untuk mendatangi langsung ketika terdapat informasi yang harus disampaikan. Berikut adalah beberapa kendala dalam pelaksanaan program BSPS di Desa Kemuning:

1. Rentang waktu pelaksanaa program BSPS di Desa Kemuning adalah 40 hari. Dari hasil yang penulis dapat ketika melakukan penelitian bahwa sumber daya waktu yang digunakan dalam pelaksanaa BSPS kurang efektif. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat percaya adanya hari baik untuk membangun sebuah rumah dan karena mayoritas penduduk Desa Kemuning bermata pencaharian sebagai petani dan peternak maka profesi tukang dan kuli jumlahnya tidak begitu banyak. Akibatnya PB dalam melakukan pembangunan tidak dapat serempak bersama-sama dan dibutuhkan tukang dari beda daerah.
2. Akses jalan yang ditempuh untuk ke rumah penerima bantuan terjal dan berliuk-liuk. Penerima bantuan BSPS Penanganan Kesmiskinan Ekstrem di Desa Kemuning beralamat di 2 RT yaitu Rt 03 dan RT 01 Dusun Grigak. Lokasi dari satu PB ke PB lain sangat jauh dan harus menuruni jalanan macadam yang sangat curam dan licin. Hal tersebut mengakibatkan ketika dilakukan dropping material oleh Toko Bangunan akan mengalami kesulitan. Sebab jalanan yang dilalui sangat sulit diakses terutama ketika hujan dan tidak semua kendaraan bisa masuk ke jalanan desa terutama kendaraan roda empat.

3. Rata-rata umur penerima bantuan sudah berusia lanjut. Hal tersebut mengakibatkan administrasi yang terhambat seperti tanda tangan yang lupa dan kendala komunikasi.
4. Terdapat dua nama penerima bantuan yang sama persis, begitupun dengan alamatnya sehingga dalam proses administrasi terkadang sulit dibedakan sehingga memerlukan KTP.
5. Perbedaan penulisan nama diberbagai dokumen sehingga menghambat proses pencairan dana BSPS bantuan melalui bank mitra program.

Adapun alternatif solusi terhadap kendala dalam pelaksanaan program BSPS di Desa Kemuning yaitu:

1. Solusi dari permasalahan waktu yang kurang efektif tersebut dilakukan melalui pemberian pengertian kepada masyarakat bahwa program BSPS merupakan program bantuan pembanguna rumah swadaya tanggung renteng dan seluruh hari merupakan hari baik. Artinya ketika salah satu PB belum selesai melakukan pembangunan rumah, maka seluruh tukang yang andil dalam BSPS desa tersebut tidak akan mendapatkan upah sebelum keseluruhan selesai. Dan untuk tukang yang jumlahnya sedikit di dusun wialayah PB, maka alternatif solusinya yaitu mendatangkan tukang dari dusun sekitar yang sesuai spesifikasi dalam program BSPS
2. Akses jalan yang terjal dan berliuk-liuk tersebut dapat ditarik alternatif solusi dengan cara melakukan *droping material* secara serentak di titik lokasi terdekat. Titik lokasi yang digunakan harus memenuhi syarat seperti bisa diakses seluruh kendaraan dan dengan lokasi pembangunan rumah PB.
3. Solusi atas penerima bantuan yang umurnya termasuk lansia maka ketika memberikan informasi digunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami PB. Selain itu, perlu dilakukan hal seperti mengingatkan dan meberikan catatan atas pelaksanaan program BSPS agar tidak terjadi miskomunikasi ataupun lupa.
4. Alternatif seolusi atas data administrasi yang sama persis maka diperlukan sebuah dokumen pembeda seperti KTP atau SIM yang dapat menunjukan perpedaan keduanya melalui nama ibu kandung, nomor KTP, atau tanggal lahir.
5. Perbedaan penulisan nama dalam administrasi berakibat pada masalah dengan pihak ketiga yaitu perbankan yang tidak dapat mencairkan dana bantuan. Sehingga solusi yang dapat digunakan yaitu dengan mengumpulkan dokumen yang mempunyai kesamaan nama, minimal adalah 3 dokumen seperti akte kelahiran anak, ijazah, KK, surat kepemilikan tanah, surat kepemilikan kendaraan dan lain sebagainya.

### **Dampak Program BSPS bagi Kesejahteraan Masyarakat Penerima Bantuan di Desa Kemuning**

Program BSPS secara langsung tidak memberikan dampak terhadap bagaimana kondisi ekonomi daerah tersebut. Hal ini dikarenakan tujuan dari program ini adalah meningkatkan kulaitas dari rumah tidak layak huni. Tetapi secara tidak langsung program ini memberikan efek dalam jangka panjang yakni mengurangi pengeluaran masyarakat atas biaya perbaikan rumah. Dalam pelaksanaan program BSPS teedapat beberapa faktor pendukung implementasi seperti tujuan program BSPS yang sejalan dengan kebutuhan yang dibebankan pada MBR dalam membangun rumah secara swadaya.

Masyarakat dalam merespon program BSPS dilakukan secara positif berupa dukungan dan mengikuti sesuai petunjuk teknis atas realisasi program tersebut. Berdasarkan wawancara dengan salah satu Penerima Bantuan (PB) di Desa Kemuning bahwa program BSPS sangat membantu dalam meningkatkan kehidupan masyarakat. Meski program BSPS di Desa Kemuning belum sempurna dan masih banyak terdapat hambatan tetapi dengan adanya program BSPS, masyarakat dapat meningkatkan produktivitasnya atas peningkatan kualitas rumah tempat tinggal mereka. Adapun keterkaitan antara rumah layak huni dengan kesejahteraan masyarakat bahwa rumah sebagai tempat tinggal memiliki fungsi yang luas dalam pelaksanaan kehidupan manusia. Dengan demikian, rumah memiliki dua manfaat bagi kehidupan manusia yaitu secara fisik dan mental. **Pertama**, secara fisik rumah akan melindungi penghuni dari bahaya baik secara internal maupun eksternal. Misalnya kondisi cuaca, hewan liar, bencana alam, dan bahaya lainnya. **Kedua**, secara mental rumah akan memberikan energi positif bagi penghuninya seperti rasa aman, nyaman, mendukung produktivitas, dan sebagai fasilitas penunjang kesehatan. Selain itu, rumah juga memiliki fungsi bagaimana orang menilai kondisi penghuninya serta sarana dalam pembinaan tumbuh dan kembangnya anggota keluarga. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana karakter, nilai sosial, dan kesejahteraan pemilik rumah tersebut.

Program BSPS di Desa Kemuning memberikan begitu banyak dampak positif bagi masyarakat salah satunya melalui aspek ekonomi dan sosial walaupun tidak langsung terlihat. Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari program BSPS di Desa Kemuning ada 2 macam yaitu dalam jangka panjang dan jangka pendek. **Jangka pendek**, terjadi penyerapan tenaga kerja yang ikut andil dalam program BSPS sebagai tukang dan kuli. Hal ini memberi implikasi bahwa dampak yang ditimbulkan secara tidak langsung yaitu penurunan angka pengangguran secara sementara di Desa Kemuning. Selain itu, ketika tenaga kerja sekitar terserap maka dapat meningkatkan taraf hidup pekerja karena adanya peningkatan pendapatan yang mendorong daya beli masyarakat. Begitupun efek ekonomi bagi toko bangunan yang bekerja sama dalam program BSPS bahwa pendapatan mereka meningkat sehingga karyawan yang dibutuhkan juga akan ditambah ketika jumlah permintaan atas pembelian dan pengiriman material bangunan naik. Sedangkan **jangka panjang**, adanya peningkatan kualitas rumah menjadi layak memberikan dampak positif bagi penerima bantuan seperti peningkatan nilai jual rumah dan cara pandang masyarakat terhadap kehidupan mereka. Dalam pembangunan BSPS, PB mengeluarkan dana swadaya ± Rp 25.000.000,- sampai dengan Rp 35.000.000,- sehingga akan terbangun rumah yang layak huni yang terpasang fasilitas sanitasi dan lain sebagainya. Dengan demikian, nilai jual rumah tersebut akan naik dari tahun ke tahunnya dan PB tidak membutuhkan dana lebih untuk biaya perbaikan setiap saat ketika seperti masih menempati rumah tidak layak huni.

Pembangunan rumah layak huni melalui program BSPS di Desa Kemuning juga akan memberi dampak pada aspek kesehatan dan potensi ekonomi. Salah satunya dengan pelaksanaan program BSPS yang tercapai sehingga menghasilkan rumah layak huni berfasilitas sanitasi dan MCK serta spesifikasi rumah yang dimiliki dapat meningkatkan produktivitas melalui ekonomi kreatif ataupun UMKM. Melihat potensi Desa Kemuning merupakan daerah penghasil pertanian/tegal seperti padi, jagung, dan singkong. Hasil tersebut dapat dibuat peluang bisnis

menjadi olahan yang lebih bernilai jual dengan memanfaatkan spesifikasi hunian setelah adanya program BSPS. Dan dalam aspek kesehatan, peningkatan RLH akan



mengurangi kondisi stunting pada anak dan masalah kesehatan bagi perempuan. Sebab perempuan dan anak adalah tokoh utama yang berada dirumah sehingga keadaan sanitasi dan MCK sangat menunjang bagaimana kondisi kesehatan anggota keluarga. Berikut adalah salah satu dokumentasi program BSPS di Desa Kemuning atas 17 rumah penerima bantuan sebelum dan setelah pelaksanaan program:

Sumber: Foto kegiatan bersama TFL

Gambar di atas merupakan dokumentasi Program BSPS di Desa Kemuning atas rumah Bapak Podo dengan dana stimulant dari pemerintah sebesar Rp 17.500.000,- untuk membeli material bangunan dan Rp 2.500.000,- sebagai upah pekerja. Berdasarkan foto tersebut dapat diketahui bahwa program ini sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam meningkatkan kualitas rumahnya menjadi layak huni. Dan program BSPS di Desa Kemuning dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat membantu dalam upaya mengurangi kemiskinan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil uraian penulis dalam pembahasan, disimpulkan bahwa masalah kemiskinan selalu menjadi kompleksitas berbagai persoalan. Kemiskinan menjadi fokus utama pemerintah dalam berbagai program baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dalam mencari alternatif solusi mengentaskan kemiskinan. Pemerintah melalui program BSPS ditunjukan kepada MBR sebagai upaya dalam mengantasi hal tersebut dengan fokus utama di penelitian ini adalah Desa Kemuning. Program BSPS di Desa Kemuning berhasil menyasar rumah tidak layak huni sebesar 17 PB dengan alokasi dana stimulant Rp 20.000.000,- per rumah. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala terutama adalah akses jalan menuju rumah PB dalam *dropping material* dan budaya masyarakat setempat terkait hari baik. Peneliti melakukan observasi dan ikut serta dalam mencari alternatif solusi atas masalah tersebut melalui pemberian penjelasan dan pemahaman kepada PB terkait bagaimana program BSPS dilaksanakan yaitu secara “tanggung renteng”. Dan untuk akses jalan terjal dan rusak maka alternatif solusi yang dilakukan yaitu dengan melakukan *dropping material* pada titik tertentu yang bisa diakses seluruh kendaraan dan tidak jauh dari lokasi PB. Untuk dampak yang

dihasilkan atas program BSPS di Desa Kemuning adalah terjadinya efek ekonomi baik jangka panjang ataupun jangka pendek secara tidak langsung. Dalam jangka panjang terjadi penyerapan tenaga kerja yang ikut andil dalam program BSPS sebagai tukang dan kuli. Hal ini akan berpengaruh pada tingkat pengangguran sementara di Desa Kemuning akan terserap. Sedangkan untuk jangka panjangnya yaitu terdapat peningkatan kualitas rumah menjadi layak yang akan memberikan dampak positif bagi penerima bantuan. Selain itu, pengaruhnya terkait kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan adanya program BSPS adalah terjadi peningkatan kesejahteraan hidup karena adanya aktivitas produktif serta MCK sebagai penunjang.

### **Saran**

Program BSPS merupakan program yang belum banyak di kenal di masyarakat karena masyarakat lebih familiar dengan nama program “Bedah Rumah”. Sehingga dibutuhkan sosialisasi lebih mendalam kepada masyarakat terkait program BSPS dan bagaimana persyaratan serta alur dari program tersebut. Selain itu dalam program BSPS terdapat dua jenis proyek yaitu BSPS Reguler dan BSPS Penanganan Kemsikinan Ekstrem. Dan kedua program tersebut memiliki sasaran yang cukup berbeda dalam cakupan sosial ekonomi penerima bantuan. Dengan demikian dibutuhkan dana lebih besar untuk pelaksanaan BSPS PKE yaitu lebih dari Rp 20.000.000,-. Sebab penerima bantuan BSPS PKE memiliki keadaan ekonomi yang lebih kurang dari pada BSPS Reguler. Selain itu juga faktor akses jalan yang susah mengakibatkan tambahan biaya untuk mengangkut material program ke lokasi pembangunan rumah.

### **REFERENSI**

- Andiny, P., & Mandasari, P. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 1(2), 196–210.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Profil kemiskinan di indonesia september 2018. *Berita Resmi Statistik*, 01(05), 1–8.
- Desyra, T. E. (2022). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. *Jap*, VIII(113), 12–20. <http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/1492>
- Dharma, B., & Bangun, M. (n.d.). *EVALUASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KORA SUBULASSALAM PROVINSI ACEH*.
- Fathurohman, M. F., Dayat, U., & Ramdani, R. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(1), 697–703. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5919623>
- Firmansyah, H., Anjani, A. N., Hurdianti, D., Miharja, L. N. A. D., Agustian, N., & Hariadi, H. (2022). Penerapan Fintech Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 02(01), 43–61. <https://jurnal.unsur.ac.id/Elecosy/Article/View/2013/1565>
- Handayani, D., & Safrida, S. (2022). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Masa Pandemi COVID-19 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 34–45.

<https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.41440>

- Nasution, L. N. (2019). Kajian Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara Pasca Pemekaran. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 19(1), 13–20. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v19i1.3235>
- Rakyat, K. P. U. dan P. (2017). *Rumah Layak huni*.
- Rakyat, K. P. U. dan P. (2023). *Sebaran Wilayah dan Jumlah Data RTLH*.
- Rakyat, M. P. U. dan P. (2022). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya*.
- Rofiqoh, S., & Asmuni. (2021). PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA SABRANG KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER TAHUN 2017. *Majalah Ilimah "CAHAYA ILMU" Vol. 3 No. 1 2021*, 47(4), 124–134. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>
- Ryan, Cooper, & Tauer. (2020). IMPLEMENTASI BSPS (BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA) DI KECAMATAN CIKAUM KABUPATEN SUBANG. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Sari, W., Prayendi, D. A., Aulia, R. G., Idzni, H., Yunus, S. M., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(1), 1–10.
- Zain, M. H., & Wardani, M. (2019). *Implementasi Program Bantuan Stimulan*. 7(2), 6836–6850.